

Latihan Ulangan Semester

I. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu
 - a. eksekutif
 - b. legislatif
 - c. yudikatif
 - d. konstitutif
 - e. eksaminatif
2. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan
 - a. konstitutif
 - b. eksekutif
 - c. legislatif
 - d. yudikatif
 - e. moneter
3. Menurut pandangan John Locke, pemerintahan pada suatu negara harus dipisah-pisahkan menjadi beberapa bidang kekuasaan, yaitu
 - a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
 - b. eksekutif dan yudikatif
 - c. legislatif dan eksekutif
 - d. legislatif, eksekutif, dan federatif
 - e. legislatif dan federatif
4. Pemegang kekuasaan yudikatif terdiri atas
 - a. MA, MK, dan KY
 - b. DPR, MPR, dan DPD
 - c. DPR dan BPK
 - d. BPK, KY, dan presiden
 - e. DPD, MPR, dan presiden
5. Lembaga negara yang dihapus setelah adanya perubahan UUD 1945 adalah
 - a. Dewan Pertimbangan Agung
 - b. Mahkamah Agung
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Badan Pemeriksa Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara sehingga memiliki kekuasaan
 - a. eksaminatif
 - b. moneter
 - c. yudikatif
 - d. legislatif
 - e. federatif
7. Pancasila harus menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan makna Pancasila dalam dimensi
 - a. idiil
 - b. konstitusional
 - c. institusional
 - d. kultural
 - e. spiritual
8. Asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat ia dilahirkan tanpa mengindahkan kewarganegaraan orang tuanya disebut asas
 - a. repudiasi
 - b. ganda
 - c. tunggal
 - d. *ius sanguinis*
 - e. *ius soli*
9. Pemerolehan kewarganegaraan seseorang bukan karena pemberlakuan asas *ius sanguinis* dan *ius soli* dinamakan
 - a. proses hukum warga negara
 - b. pewarganegaraan
 - c. pernyataan menjadi warga negara
 - d. pengajuan warga negara
 - e. permohonan warga negara
10. Seorang warga negara Tiongkok yang menganut asas *ius sanguinis* memiliki anak di Amerika Serikat yang menganut asas *ius soli*, maka status kewarganegaraan anak itu adalah
 - a. apatride
 - b. memperoleh satu kewarganegaraan
 - c. memperoleh dengan permohonan
 - d. bipatride
 - e. pengajuan warga negara
11. Untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi, suatu permohonan yang diajukan secara tertulis dan bermeterai lengkap ditujukan kepada
 - a. Kedutaan Besar RI
 - b. Presiden
 - c. Menteri Luar Negeri
 - d. Menteri Dalam Negeri
 - e. Menteri Kehakiman

12. Berikut ini yang **tidak** termasuk hak warga negara Indonesia adalah
- berhak mendapatkan perlindungan hukum
 - berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
 - bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
 - berhak melakukan pembelaan terhadap negara Indonesia
13. Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan disebut dengan hak
- amnesti
 - opsi
 - repudiasi
 - ekstirpasi
 - refusiasi
14. Undang-undang kewarganegaraan pertama kali yang dipakai Indonesia adalah
- UU No. 3 Tahun 1946
 - UU No. 62 Tahun 1958
 - UU No. 7 Tahun 1984
 - UU No. 6 Tahun 2001
 - UU No. 12 Tahun 2006
15. Berikut ini asas-asas yang digunakan dalam penyusunan UU No. 12 Tahun 2006, **kecuali** asas
- ius soli*
 - ius sanguinis*
 - kewarganegaraan tunggal
 - kewarganegaraan ganda terbatas
 - apatride
16. Berikut ini yang **tidak** termasuk usaha untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama adalah
- toleransi antar umat beragama
 - kemerdekaan beragama dilaksanakan dengan adil dan benar
 - menumbuhkan kerukunan dalam pergaulan
 - menumbuhkan saling pengertian dalam pergaulan
 - pembiaran atas penodaan terhadap agama tertentu
17. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari
- presiden
 - DPR
 - DPD
 - MA
 - MK
18. Salah satu tugas presiden sebagai kepala negara adalah memegang kekuasaan AD, AL, dan AU yang diatur dalam Pasal ... UUD 45.
- 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
19. Presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam hal
- membuat undang-undang
 - membuat gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya
 - membuat peraturan pemerintah
 - menjalankan pemerintahan
 - memilih anggota DPD
20. Menguji semua peraturan perundangan yang ada di bawah undang-undang adalah wewenang dari
- presiden
 - DPR
 - DPD
 - MK
 - MA
21. Jumlah anggota DPR berdasarkan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008 ditentukan sebanyak ... orang.
- 560
 - 550
 - 540
 - 530
 - 575
22. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak ... orang.
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
23. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden adalah kewajiban dari
- MA
 - KY
 - DPD
 - BPK
 - MK
24. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri disebut
- otonomi daerah
 - kewenangan daerah
 - daerah khusus
 - daerah otonom
 - gemeinschaft*

25. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah
- pendidikan
 - agama
 - sosial
 - pertahanan
 - kesehatan
26. Berikut termasuk empat daerah istimewa di Indonesia, **kecuali**
- Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
 - Provinsi Papua
 - Provinsi Aceh
 - Provinsi Kalimantan Utara
 - Daerah Istimewa Yogyakarta
27. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal
- 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
28. Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah adalah UU Nomor ... Tahun 2004.
- 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
29. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut asas
- desentralisasi
 - sentralisasi
 - dekonsentrasi
 - perbantuan
 - good governance
30. Sekretaris daerah mempunyai tugas untuk
- menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
 - mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah
 - melakukan hak interpelasi
 - menghitung keuangan daerah
 - melantik kepala daerah

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Sebutkan salah satu contoh asas bipartide!
- Apa makna warga negara dan bukan warga negara?
- Apa tugas Badan Pemeriksa Keuangan?
- Bagaimanakah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?
- Jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan daerah!

Soal Remidi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Tuliskan bunyi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tentang bela negara!
- Sebutkan bidang-bidang yang ditangani Komisi I, II, III DPR!
- Berikan salah satu contoh asas kewarganegaraan *ius soli*!
- Apa tujuan dari adanya partisipasi politik?
- Apa pengertian daerah otonom?

Soal Pengayaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Jelaskan yang dimaksud teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan!
- Sebutkan tugas dan wewenang Mahkamah Agung!
- Jelaskan yang dimaksud naturalisasi istimewa!
- Apa yang dimaksud dengan zona laut teritorial dan zona landas kontinen?
- Sebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional dan nonkonvensional!
- Apa perbedaan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Jelaskan!
- Bagaimana mekanisme penetapan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah?
- Mengapa pemilu merupakan wujud kekuasaan rakyat yang paling nyata?
- Sebutkan ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta!
- Sebutkan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 32 Tahun 2004!